

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 29 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Agraria

Revitalisasi Damkar dan Dorong Reboisasi

DI Kabupaten Pekalongan selama Januari – Oktober tercatat 55 kali kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejumlah langkah sudah dan akan dilakukan Pemkab Pekalongan untuk menangani bencana tersebut. Di antaranya akan merevitalisasi sarana-prasarana pemadam kebakaran (damkar) dan mendorong reboisasi.

Sekda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar mengatakan, koordinasi dengan Pemprov Jateng dan Perhutani terus dilakukan. Sebab, hutan berada di bawah wewenang mereka. "Tapi kami sebagai pemerintah daerah punya langkah sesuai fungsi. Penanganan kebencanaan, terma-

suk karhutla, sudah masuk kami anggarkan sebagai belanja tidak terduga (BTT)," ujarnya.

Ia menambahkan, tahun depan Pemkab Pekalongan akan merevitalisasi total unit damkar. Saat ini, markas damkar masih terletak di Dinas PU-Taru. Padahal kini damkar sudah melekat dengan Satpol PP. "Jadi nanti tahun depan akan kami pindah jadi satu dengan markas Satpol PP. Ini agar koordinasi mereka cepat dan mudah," ujarnya.

Revitalisasi juga dilakukan dengan memperbaiki (upgrade) mobil damkar. Termasuk peralatan dan perlengkapannya. Akbar mengatakan, Pemkab sebenarnya

punya proyeksi mobil damkar disiagakan di beberapa kecamatan. "Tapi kami harus melihat kemampuan keuangan daerah. Sehingga itu mungkin baru bisa kami wujudkan secara bertahap. Sementara revitalisasi dulu," tegasnya.

Soal reboisasi hutan yang telah terbakar, Pemkab sudah berbicara dengan pihak perhutani. Langkah ini Pemkab dorong juga untuk mengantisipasi bencana longsor yang tahun lalu kasusnya cukup banyak. "Ini sudah masuk musim penghujan, jadi reboisasi juga sedang kami dorong. Pijakan kami adalah pengalaman tahun lalu," tambahnya. (nra/fth)